

DILEMA KENAIKAN ROYALTI MINERBA

Perubahan Tarif Royalti Nikel

	PP No. 26/2022		PP No. 19/2025	
	HMA Nikel (US\$ per ton)	Tarif	HMA Nikel (US\$ per ton)	Tarif
Bijih Nikel	Seluruh harga	10%	< 18.000	14%
			18.000 s/d < 21.000	15%
			21.000 s/d < 24.000	16%
			24.000 s/d < 31.000	18%
Niche Metals	< 21.000	2%	< 18.000	3,5%
			18.000 s/d < 21.000	4%
			21.000 s/d < 24.000	4,5%
			24.000 s/d < 31.000	5%
> 21.000	3%	< 18.000	5,5%	
		18.000 s/d < 21.000	4%	
		21.000 s/d < 24.000	4,5%	
		24.000 s/d < 31.000	5%	
Ferroalloy	Seluruh harga	2%	< 18.000	4%
			18.000 s/d < 21.000	4,5%
			21.000 s/d < 24.000	5%
			24.000 s/d < 31.000	5,5%
Metal Ppt Iron	Seluruh harga	5%	< 18.000	5%
			18.000 s/d < 21.000	5,5%
			21.000 s/d < 24.000	6%
			24.000 s/d < 31.000	6,5%
> 31.000	7%	< 18.000	5%	
		18.000 s/d < 21.000	5,5%	
		21.000 s/d < 24.000	6%	
		24.000 s/d < 31.000	7%	

■ Terdapat penyesuaian royalti beberapa komoditas menjadi mengikuti harga mineral acuan.

■ Royalti nikel naik signifikan dari semula 10% menjadi 14%-19%.

Perubahan Tarif Royalti Emas

PP No. 26/2022		PP No. 19/2025	
HMA Emas (US\$/t2)	Tarif	HMA Emas (US\$/t2)	Tarif
< 1.300	3,75%	< 1.800	7%
1.300 s/d < 1.400	4%	1.800 s/d < 2.000	10%
1.400 s/d < 1.500	4,25%	2.000 s/d < 2.200	11%
1.500 s/d < 1.600	4,5%	2.200 s/d < 2.500	12%
1.600 s/d < 1.700	4,75%	2.500 s/d < 2.700	14%
1.700 s/d < 1.800	5%	2.700 s/d < 3.000	15%
1.800 s/d < 1.900	6%	> 3.000	16%
1.900 s/d < 2.000	8%		
> 2.000	100%		

Perubahan Tarif Royalti Bijih Tembaga

PP No. 26/2022		PP No. 19/2025	
HMA Emas (US\$/t2)	Tarif	HMA Emas (US\$/t2)	Tarif
< 7.000	10%		
7.000 s/d < 8.500	13%		
8.500 s/d 10.000	15%		
> 10.000	17%		

Sumber: Kementerian ESDM, Stockbit

Affifah R. Nurdifa & Lili Sunardi
redaksi@bisnis.com

Pemerintah bergeming dengan keluhan penambang dan tetap mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19/2025 yang berisi kenaikan royalti mineral dan batu bara atau minerba. Dalam aturan tersebut, pemerintah tidak hanya menaikkan royalti komoditas minerba, melainkan juga mengenakan tarif progresif.

Meski baru akan berlaku efektif 15 hari setelah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 11 April 2025, pelaku industri pertambangan waswas. Musababnya, kenaikan royalti itu dianggap tinggi di tengah lesunya harga komoditas minerba di pasar global. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin mengatakan, kenaikan royalti minerba bakal mengurangi minat

PNBP Minerba (Rp Triliun)



ga untuk jangka panjang penerimaan negara justru bakal berkurang.

Industri minerba selama ini merupakan salah satu tulang punggung penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada 2024, PNBP

dipastikan bakal melakukan efisiensi biaya produksi saat royalti naik. Seluruh perusahaan pertambangan pun dipastikan bakal mengalokasikan ulang biaya operasional mereka.

terkait dengan kenaikan tarif royalti minerba hingga 26 April 2025.

Artinya, hingga pemerintah tetap terbuka dengan masukan dari berbagai pihak hingga aturan tersebut betul-betul berlaku.

"Untuk masa transisi 15 hari ini kami menyesuaikan sistem, dan sosialisasi. Jadi menunggu hingga 26 April 2025 hingga sudah bisa kami implementasikan," kata Yuliot.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, kenaikan tarif royalti minerba dilakukan demi mengerek PNBP yang dipatok mencapai Rp124,5 triliun pada tahun ini.

Adapun, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar menilai kenaikan PNBP minerba

investasi di sektor hulu hingga hilir nikel. Kebijakan itu juga berpotensi menurunkan daya saing produk nikel nasional di pasar global.

"Ujungnya bisa memicu PHK massal akibat tekanan margin perusahaan pertambangan, terutama di sektor hilir yang sudah menyerap ratusan ribu tenaga kerja," katanya, Rabu (16/4).

Tidak hanya itu, beleid itu juga diproyeksi bakal memaksa penambang meningkatkan *cut off grade*, sehingga menyusutkan cadangan mineral nasional. Dengan cadangan mineral yang menyusut, kata Meidy, maka tingkat produksi dan *life of mine* ikut berkurang, sehing-

nya sektor minerba mencapai Rp140,5 triliun.

Kekhawatiran APNI bukan tanpa alasan, nikel menjadi salah satu komoditas yang kenaikan royaltinya cukup signifikan. Misalnya saja untuk bijih nikel dari yang semula 10% menjadi 14%-19%. (Lihat infografik)

Dalam kesempatan berbeda, Indonesian Mining Association (IMA) menilai rencana penerapan tarif royalti baru di tengah eskalasi perang dagang dapat memberi tekanan terhadap industri.

Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia sempat mengatakan, pengusaha pertambangan

Analisis Citigroup Inc. Ryan Davies dalam risetnya menyatakan bahwa kenaikan royalti minerba mungkin memengaruhi dominasi Indonesia dalam industri penghiliran.

"Hal ini mungkin akan berdampak pada dominasi Indonesia dalam industri penghiliran di tengah potensi respons pasokan dalam jangka menengah hingga panjang melalui penghambatan pertumbuhan pasokan baru," katanya, dikutip dari Bloomberg, Rabu (16/4).

TERIMA MASUKAN

Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan pemerintah bakal memberikan waktu untuk sosialisasi dan penyesuaian sistem

sebagai langkah yang paling mungkin untuk diambil pemerintah saat ini.

"Opsinya yang lain akan lebih berdampak pada kelas menengah ataupun daya beli masyarakat. Kalaupun ada dampak dari kenaikan royalti terhadap kelas menengah ataupun daya beli, saya kira dampaknya paling kecil dibandingkan dengan opsi lain," ujar Fajry.

Selain itu, kenaikan tarif royalti diperlukan, mengingat PNBP dari badan usaha milik negara (BUMN) sudah tidak masuk lagi ke kas negara, tetapi dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. (M. Ryan Hidayatullah/Surya D.A. Simanjuntak) E

